MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS PERAN DEMOKRASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Pasya Anjani[1], Batara Adhestama[2]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
[1-2] Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email:pasyaanjani4826@gmail.com,bataraadhes@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of democracy on economic growth in Indonesia. Democracy is viewed as a system of governance that provides space for public participation, transparency, and accountability in the policymaking process. This research employs a qualitative descriptive approach using library research methods. Data were obtained from various secondary sources such as books, academic journals, reports from the Central Statistics Agency (BPS), and official government documents relevant to the research theme.

The results indicate that democracy plays an important role in promoting economic growth through political stability, increased public participation, and effective oversight of government policies. A healthy democratic system can create a conducive investment climate and strengthen public trust in the government. However, the benefits of democracy for economic growth have not been fully optimized due to persistent challenges such as corruption, social inequality, and weak governance. Therefore, strengthening democratic institutions and improving the quality of public policy are key to achieving equitable and sustainable economic development in Indonesia.

***Keywords**: Democracy, Economic Growth, Welfare, Governance, Indonesia.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Demokrasi dipandang sebagai sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas politik, peningkatan partisipasi publik, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Sistem demokrasi yang sehat dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun demikian, manfaat demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya optimal akibat masih adanya tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1326
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

institusi demokrasi dan peningkatan kualitas kebijakan publik menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: *Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan, Tata Kelola Pemerintahan, Indonesia*.

PENDAHULUAN

Demokrasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua pilar penting dalam pembangunan suatu negara modern. Demokrasi mencerminkan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keduanya saling berkaitan erat karena stabilitas politik yang demokratis sering kali menjadi prasyarat bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan arah kebijakan pemerintah melalui mekanisme partisipasi politik, seperti pemilihan umum dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, dalam praktiknya, penerapan demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, tidak selalu berjalan sesuai harapan. Masih terdapat berbagai persoalan seperti lemahnya kelembagaan politik, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat, serta praktik korupsi dan politik uang yang menghambat kinerja ekonomi.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, tetapi pertumbuhan tersebut akan lebih bermakna apabila diiringi dengan pemerataan hasil pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sistem demokrasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial dapat mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Dalam konteks Indonesia, demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dengan sistem politik yang terbuka dan partisipatif, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berlangsung secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kajian mengenai hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi relevan untuk memahami sejauh mana penerapan nilai-nilai demokratis mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat fondasi pembangunan nasional.

LANDASAN TEORI

Pengertian Demokrasi

Secara bahasa, istilah demokrasi berasal dari dua kata Yunani Kuno, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos yang bermakna kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam pandangan Oxford English Dictionary, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang berpijak pada kedaulatan rakyat, dijalankan langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Senada dengan itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan rakyat, di mana seluruh warga negara

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ikut berpartisipasi dalam mengatur jalannya pemerintahan melalui wakil-wakil mereka yang dipilih secara sah.(Reksoprayitno, 2004)

Menurut definisi di atas, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat. Karena rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, pemerintah perlu mengikutsertakan mereka dalam pengambilan keputusan juga. Karena demokrasi tidak termasuk monarki atau kekuasaan absolut yang tidak dibatasi oleh undang-undang, maka pemerintahan Negara sangat dipengaruhi oleh sistem demokrasi. Indonesia mengikuti sistem demokrasi berdasarkan Pancasila, seperangkat lima prinsip,dan UUD 1945.(Averina & Widagda, 2021)

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan pengambilan keputusan dijalankan oleh rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti memilih pemimpin atau anggota parlemen, dan juga berhak menyuarakan pendapat mereka. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana kebijakan dan tindakan pemerintah harus mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. Demokrasi juga mengedepankan prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan aturan hukum. Dalam demokrasi, pemilihan umum adalah cara utama untuk mengekspresikan preferensi politik dan menentukan perwakilan publik. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup konsep demokrasi yang unik dan memiliki urgensi tersendiri.(Nabila et al., 2024)

Dengan demikian, pengembangan demokrasi bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.Prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, hak memilih, dan akses yang setaraterhadap proses politik menjadi dasar dari upaya ini. Dengan memberdayakan rakyatuntuk berpartisipasi, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan keinginan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.(H et al., 2024)

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznet salah satu ekonom besar peraih hadiah nobel di bidang ekonomi pada tahun 1971 memberikan definisi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasistas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap tuntutan-tuntutan yang ada.(Wianti & Nurgaheni, 2020)

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Hicks mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati penggunanya telah cukup dikenal.Menurut Simon Kuznets dalam Jhingan (2004:57) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.(Masloman et al., 2018)

Pertumbuhan ekonomi berarti perekonomian telah melalui proses perbaikan dan mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi (Adib et al., 2019). Menurut Sukirno pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kuantitatif perkembangan suatu perekonomian pada tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada seberapa besar perubahan perekonomian pada suatu tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan perekonomian suatu negara

tercermin dari pertumbuhan ekonominya, yang diukur dari tingkat pertumbuhannya.(Sabardin & Muhammad Ghafur Wibowo, 2024)

Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan JohnStuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Terus berkembang berdasarkan analisisanalisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa neo klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut HarrodDomar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi,dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (capital stock).

4. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (enterpreneurship) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru,maupun memperluas usaha yang telah ada. (Amdan & Sanjani, 2023)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Sumber Daya Alam (SDA)

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan mineral sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.Pemanfaatan yang bijaksana dapat memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan

Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM dapat memperbaiki atau menyengsarakan kemampuan dagang suatu negara. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi. Investasi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi.

Akumulasi Modal

Proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa infrastruktur, teknologi, peralatan, mesin, dan bangunan merupakan faktor penting dalam meningkatkan produksi dan efisiensi ekonomi suatu negara.

Aspek Sosial Budaya

Faktor-faktor seperti nilai-nilai budaya, motivasi kerja masyarakat, serta kelembagaan ekonomi juga berperan dalam membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kemajuan Teknologi

Perkembangan teknologi memainkan peran kunci dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi di berbagai sektor ekonomi. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi menjadi kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Teknologi yang menaikkan produktivitas SDM dan modal.

Pasar Luar Negeri

Akses ke pasar internasional melalui perdagangan bebas dapat membuka peluang ekspansi bagi produk domestik suatu negara.Ekspor dan impor yang seimbang dapat memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Struktur Politik dan Administrasi Pemerintah

Stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang pro-investasi dan transparan akan mendukung perkembangan perekonomian suatu negara. Sedangkan politik dan pemerintahan yang lemah dan korup sangat menghambat kemajuan ekonomi.(Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal et al., 2024)

Tantangan dan Prospek Demokrasi

Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 (Abdoellah, 2016).Meskipun demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan kebebasan sipil dan hak asasi manusia, namun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam memperkuat institusi demokratis, mendorong partisipasi warga negara, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan pluralistik. Tentu dalam mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan kerja keras, komitmen, dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Proses demokratisasi yang berhasil membutuhkan upaya kolaboratif yang luas dan konsisten untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan demokrasi yang berkelanjutan (Silalahi & Syafri, 2015).

Indonesia pada Indeks Demokrasi global merupakan ukuran untuk mengevaluasi kualitas dan tingkat demokrasi sebuah negara di seluruh dunia (Rahmatulloh, 2019). Indeks Demokrasi global ini diterbitkan oleh lembaga think-tank asal Inggris bernama Economist Intelligence Unit (EIU). Dimana EIU adalah cabang riset dari majalah bisnis dan ekonomi ternama, The Economist. Indeks ini menilai kondisi demokrasi di seluruh dunia dengan menggunakan 60 indikator yang terbagi dalam lima kategori, yaitu proses pemilihan, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan hak sipil.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Dalam Indeks Demokrasi global, sebuah negara dinilai berdasarkan 5 kategori, yaitu: (1) Partisipasi politik, (2) Budaya politik, (3) Kebebasan sipil, (4) Fungsi pemerintah, (5) Proses pemilihan. Kendati Indonesia berhasil naik peringkat pada Indeks Demokrasi global, masih banyak tantangan dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.Disamping tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun demokrasi yangberkelanjutan. Indonesia pun memiliki prospek yang cukup baik dalam membangun demokrasiyang lebih baik di masa depan (Bisma, 2017). Hal ini dikarenaka indonesia sebagai suatu negaradengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, memiliki potensi besar dalam melahirkan partisipasi politik yang kuat dan demokratis dari rakyatnya.(Rohmatillah & Zaini, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menggali makna, konteks sosial, serta dinamika politik dan ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis fakta dan hubungan antara prinsip-prinsip demokrasi — seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas — dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, artikel akademik, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yaitu menelaah isi dari sumber-sumber literatur untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang menggambarkan pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis diinterpretasikan secara deskriptif untuk menunjukkan sejauh mana penerapan sistem demokrasi di Indonesia mampu mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Demokrasi Pada Pertumbuhan Ekonomi

Demokrasi memiliki efek menguntungkan baik politik dan ekonomi.lembaga-lembaga demokrasi memiliki peran untuk mengontrol kekuasaan pemerintah dan membatasi perilaku pemerintah atau dimaksudkan untuk memperkenalkan kebijakan tidak populer. Diantara manfaat demokrasi adalah bahwa hal itu memungkinkan pengusiran pemimpin yang buruk.Hasil penelitian empiris tentang demokrasi terbagi menjadi tiga. Sekitar sepertiga penelitian menemukan dampak positif demokrasi terhadap pertumbuhan, sepertiga yang lainnya menemukan bahwa demokrasi tidak berdampak apa-apa, dan sepertiga sisanya menemukan bahwa demokrasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Baru-baru ini Ahmed Mobarak berpendapat bahwa rezim demokratik akan lebih stabil daripada rezim autokrasi. Hasilnya, karena perekonomian yang lebih tidak stabil diketahui tumbuh lebih lambat daripada perekonomian yang stabil, efek positif demokrasi pada pertumbuhan dapat terlaksana melalui saluran ini. Namun, manfaat yang diperoleh dapat dinegosiasikan oleh efek negatif demokrasi pada pertumbuhan.(Adib et al., 2019)

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pengaruh Lembaga Demokrasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Aspek lembaga demokasi merupakan aspek ketiga dalam perhitungan IDI. Aspek ini terdiri dari beberapa indikator yaitu pemilu secara bebas dan adil, peran DPRD, peran birokrasi pemerintah daerah, peran partai politik serta peran peradilan secara independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek lembaga demokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya peningkatan kualitas aspek lembaga demokrasi akan memberikan dampak secara langsung terhadap peningkatan perekonomian di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa lembaga demokrasi berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara (Diebolt et al., 2013; Fidrmuc, 2021; Ishtiaq et al., 2016; Persson & Tabellini, 2009). Selain itu, demokrasi dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan sosial bagi masyarakat (Widuri, 2021).

Walaupun nilai rata-rata keseluruhan aspek lembaga demokrasi lebih rendah dari aspek kebebasan sipil, tetapi aspek tersebut memberikan pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia secara umum. Todaro & Smith (2012) menerangkan bahwa lembaga-lembaga di suatu negara yang stabil, kuat, adaptif, dan terkonsolidasikan oleh masyarakat akan membantu proses percepatan pembangunan ekonomi. Asumsinya, pemerintahan yang demokratis akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara dengan sistem politik autoritarian. Iskandar dan Subekan (2020) menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dikarenakan adanya institusiinstitusi yang kuat dalam demokrasi. Demokrasi yang tepat dan sesuai di masyarakat dapat mendorong lebih baik kinerja lembaga atau institusi dalam berbagai bidang terutama bidang politik. Walaupun demikian, jumlah partai politik perlu dibatasi, karena semakin tinggi jumlah partai, maka anggaran negara akan semakin meningkat dan mengganggu pertumbuhan ekonomi (Wahyudi & Palupi, 2023). Penegakkan aturan hukum secara imprasial berperan dalam penguatan kelembagaan demokrasi, sehingga mampu menjaga stabilitas politik di suatu negara.

Lembaga demokrasi menjadi alat ukur dalam keberhasilan pertumbuhan ekonomi, karena lembaga tersebut dapat menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah daerah dan pusat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022) terdapat beberapa indikator yang memberikan pengaruh terhadap aspek lembaga demokrasi yaitu pemilu secara bebas dan adil, peran partai politik, dan peran peradilan yang independen. Menurut Amru dan Dartanto (2014), pemilu yang merupakan pesta demokrasi besar di Indonesia memberikan pengaruh dalam dimensi atau aspek ekonomi dalam jangka waktu pendek, mendorong peningkatan jumlah uang beredar, investasi, dan konsumsi.(Purba & Hariyadi, 2023)

Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia

Jika kita berbicara tentang implementasi, tentu saja kita akan dengan serta merta mencermati atau menyoroti fenomena-fenomena yang ada dan tampak di lapangan. Kondisi objektif suatu prinsip atau kebijakan akan memunculkan kesan apakah prinsip-prinsip itu sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan keharusannya ataukah hanya sekedar retorika belaka.Menyoroti tentang implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia kiranya ilustrasi fenomena yang terjadberikut merupakan gambaran objektif tentang pelaksanaaan demokrasi di Indonesia.

Pemilihan umum baik Presiden maupun Wakil Presiden, kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten/kota merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi. Pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan dua tahun ke belakang (2009) tidak berjalan sesuai dengan harapan. Seperti yang telah kita ketahui, kita melihat bahwa baik di media massa maupun media cetak timbul beberapa permasalahan di daerah yang menyelenggarakan pilkada. Ada suatu daerah

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

kabupaten (Pangandaran) yang menolak hasil pemilu karena data jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) tidak sesuai dengan jumlah hak pilih yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).Hal itu dinilai mencederai prinsipprinsip demokrasi karena adanya indikasi unsur kesengajaan dari pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah.

Sementara fenomana lain terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, yang diikuti oleh empat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati . Salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang kalah dalam pilkada (Iwan Saputra dan Iip Miftahul Paos) beberapa waktu yang lalu mendesak Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mendiskualifikasi calon dari petahana. Gugatan ini didasarkan oleh dugaan adanya kecurangan yang dilakukan secara masif oleh calon petahana serta KPU Kabupaten Tasikmalaya. Gugatan ini sudah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Fenomena ini termasuk kategori sudah bukan lagi merupakan pelanggaran namun sudah termasuk ke dalam kejahatan demokrasi.(Dedi Agus, 2021)

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi di Indonesia

Banyak negara-negara di dunia ini yang menggunakan sistem demokrasi untuk menjalankan sistem pemerintahannya. Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sebagai negara yang menjadi penganut sistem demokrasi, Indone9sia memiliki beberapa prinsip-prinsip demokrasi yang dapat diimplementasikan dan sesuai dengan konsep prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip ini dapat diibaratkan sebagai bahan acuan atau pedoman dalam penerapannya di lapangan. Terdapat empat prinsip demokrasi dalam konstitusi Indonesia yakni:

Pertama kedaulatan rakyat, yang mana dalam sistem demokrasi di Indonesia kedaulatan berapa di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat ini terwujud dalam badan-badan negara pemegang kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti pada Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan, yang berbunyi : “kedaulatan berapa di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian pada amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, bunyi Pasal dan Ayat tersebut diubah menjadi berbunyi: “kedaulatan berapa ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat ini menjadi salah satu hal terpenting dalam sistem politik demokrasi di Indonesia, karena kedaulatan ini merupakan hak rakyat tertinggi yang tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun, termasuk oleh negara.

Kedua yakni Pemilihan Umum yang digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakayat. Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan sebuah proses demokrasi yang mana untuk menentukan wakil rakyat secara langsung oleh warga negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum ini sangat penting sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mana dibutuhkannya partisipasi politik karena setiap hak suara yang diberikan oleh warga negara memiliki potensi sebagai penentu masa depan sebuah negara.

Ketiga yakni Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan sebuah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk yang beradap dan berakal. Dimana setiap warga negara -- memiliki hak dan kewajibannya, hak tersebut tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun termasuk negara. hak asasi manusia di Indonesia dijamin oleh konstitusi Indonesia yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang diatur pada pasal 28A sampai 28J dimana negara menjamin hak-hak dasar indivisu seperti hak atas hidup, hak atas Pendidikan, hak atas kebebasan berpendapat, ha katas Kesehatan, hak atas pekerjaan dan lain sebagainya.

Keempat yakni peran partai politik, partai politik ini memiliki peran yang penting dalam terselenggarannya pemerintahan yang demokratis dan efektif. Partai politik itu sendiri

merupakan sebuah organisasi yang bersifat nasional. Fungsi partai politik itu sendiri yakni untuk mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik yang dimiliki rakyat, berperan sebagai penyaluran kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara dan sebagainya.Dimana partai politik ini juga dijadikan sebagai sarana komunikasi politik yang mana partai politik ini memiliki kedudukan sebagai jembatan antara yang diperintah dengan yang memerintah.(Izwah Marhamah et al., 2024)

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Demokrasi memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi publik karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mana salah satu prinsip utama Demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, memilih pemerintah. Proses ini memungkinkan masyarakat berkontribusi langsung terhadap pembentukan kebijakan yang mencerminkan kepentingan bersama. Partisipasi publik dalam demokrasi diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti pemilu, musyawarah dan forum konsultasi. Pemilu yang bebas dan adil memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memilih pemimpin yang mereka anggap paling mampu mewakili kepentingan mereka. Selain itu musyawarah atau dialog publik dapat menciptakan ruang bagi warga untuk berdiskusi secara terbuka tentang isu-isu penting seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan kesehatan.Media sosial dan teknologi informasi juga memerankan peran penting dalam meningkatkan partisipasi publik dalam demokrasi modern. Melalui platform digital masyarakat dapat menyampaikan pendapat, mengorganisasi gerakan sosial atau memberikan masukan terhadap kebijakan publik.

Namun, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa ruang digital ini tidak disarankan untuk penyebaran informasi palsu atau ujaran kebencian yang dapat merusak demokrasi. Pendidikan politik menjadi elemen kunci dalam mematikan partisipasi publik yang efektif. Tanpa pemahaman yang baik tentang sistem demokrasi masyarakat mungkin cenderung pasif atau mudah dimanipulasi oleh aktor-aktor politik tertentu. Oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi politik melalui kampanye,seminar dan program pendidikan.Namun, partisipasi publik dalam demokrasi juga menghadapi beberapa tantangan seperti apatisme politik, ketimpangan akses informasi atau tekanan dari kelompok tertentu. Untukmengatasi hal ini diperlukan komitmen Pemerintah untuk menciptakan sistem yang inklusif,transparan dan akuntabel. Oleh karena itu partisipasi publik dapat menjadi kekuatan yang memperkuat demokrasi dan menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Lyrra et al., 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa demokrasi memiliki pengaruh yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sistem demokrasi memberikan landasan bagi terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel, yang pada akhirnya mendukung terciptanya iklim ekonomi yang stabil dan kondusif bagi pembangunan. Demokrasi memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menuntut transparansi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.Hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi terlihat dari bagaimana prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi masyarakat, kebebasan berpendapat, dan supremasi hukum dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan ini berdampak positif terhadap stabilitas politik, yang merupakan faktor utama dalam menarik investasi dan mendorong kegiatan ekonomi produktif. Selain itu, demokrasi juga menciptakan mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan

kekuasaan, sehingga kebijakan ekonomi dapat dijalankan dengan lebih efisien dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tantangan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan dalam mewujudkan manfaat demokrasi secara optimal. Demokrasi yang hanya berjalan secara prosedural tanpa didukung kualitas tata kelola pemerintahan yang baik justru dapat memperlambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan institusi demokrasi, peningkatan kapasitas birokrasi, serta komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan.Secara keseluruhan, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang saling melengkapi dan saling memperkuat. Demokrasi yang berkualitas dapat menciptakan stabilitas politik, keadilan sosial, dan kepercayaan publik, yang semuanya menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif dapat memperkuat legitimasi demokrasi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara penguatan nilai-nilai demokrasi dan peningkatan kinerja ekonomi secara menyeluruh.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat kualitas demokrasi melalui transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bersih agar kebijakan ekonomi lebih efektif dan berpihak pada masyarakat. Partai politik dan lembaga legislatif diharapkan meningkatkan pendidikan politik untuk mendorong partisipasi rakyat yang lebih bermakna. Dunia usaha hendaknya memanfaatkan stabilitas politik demokratis untuk memperluas investasi dan lapangan kerja. Masyarakat juga perlu aktif mengawasi kebijakan publik dan ikut serta dalam pembangunan ekonomi. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji hubungan demokrasi dan ekonomi dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Adib, Idris, & Triani, M. (2019). Analisis Pengaruh Demokrasi , Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Adib , Idris , Mike Triani Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahw. *Jurnal Ecosains*, *8*(1), 67–76.

Amdan, L., & Sanjani, M. R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *3*(1), 108–119. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2089

Averina, R. Y., & Widagda, I. G. N. J. A. (2021). Demokrasi dalam Prespektif Islam. *Tjyybjb.Ac.Cn*, *27*(2), 635–637.

Dedi Agus. (2021). Implementasi Prinsip - Prinsip Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal MODERAT*, *7*(1), 2.

H, A. A. S., Angkasa, N., Jl, A., Hajar, K., No, D., Timur, K. M., & Metro, K. (2024). *SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM KETATANEGARAAN Andi Surya S . H . Universitas Muhammadiyah (UM) Metro A .. 1*(2), 90–109.

Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal, Yosse Putra Oentoro, & Muhammad Yasin. (2024).

Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, *2*(3), 40–47. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898

Izwah Marhamah, Anis Sri Wijayanti, Martika Suci Ristyawati, Sella Agri Bardana, & Dian Permata Sari. (2024). Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangannya. *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *2*(6), 132–143. https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i6.2020

Lyrra, Ernanda Auliya Putri, Risa Anisa Putri, & Anas Malik. (2024). Analisis Peran Demokrasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Kalianda Halok Gagas*, *8*(1), 48–65. https://doi.org/10.52655/khg.v8i1.106

Masloman, I., Pembangunan, J. E., Ratulangi, U. S., & Masloman, I. (2018). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA SEKTOR YANG Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No . 01 Tahun 2018. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, *18*(01), 46–56.

Nabila, P. A., Nst, P. I., Intan, S., Fatimah, S., Trisno, B., Jl, A., Aua, G., Putiah, K., & Banuhampu, K. (2024). *Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila antara prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Indonesia . Hal ini mencerminkan keterkaitan memerintah dengan perantaraan wakilnya ; pemerintahan rakyat . Kemudian , demokrasi juga*. *2*(3).

Purba, S. F., & Hariyadi, H. (2023). Relasi Bauran Aspek Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, *14*(2), 165–188. https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.165-188

Reksoprayitno. (2004). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. *1*(1), 79.

Rohmatillah, A., & Zaini, A. A. (2023). *TANTANGAN DAN PROSPEK : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP*. 90–100.

Sabardin, & Muhammad Ghafur Wibowo. (2024). Pengaruh Aspek-Aspek Demokrasi Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, *2*(2 Desember), 119–130. https://doi.org/10.14421/jmes.2023.022-08

Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi SERAMBI Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. *2*(3), 169–176.